



Jakarta
Sukses Jakarta untuk Indonesia!



2024

**DOKUMEN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun tepat waktu dengan baik.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sedangkan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD Tahun 2024. Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja PD juga harus berpedoman pada RKPD untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta ini, baik secara substansi perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyelarasan dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam berkolaborasi guna membangun kota Jakarta yang kita cintai bersama ini.

Jakarta, Juli 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta


Lusiana Herawati
NIP. 196706131988032002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Program dan indikator kinerja yang diampu Badan Pendapatan Daerah dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026 yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Indikator Kinerja:
 - o Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
 - o Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Indikator Kinerja
 - o Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu RKPD Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2024 dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan pada Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berperan dalam mendukung tercapainya Misi ke-5 (lima) yaitu "Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan", yakni membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah akan berupaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, dan juga peningkatan pelayanan publik serta peningkatan.

Penyusunan Renja PD mengacu dan mempedomani klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta hasil pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang terdiri atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilengkapi dengan kinerja, indikator kinerja serta satuan.

Dengan harapan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam percepatan pencapaian Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	
BAB I Pendahuluan	I
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	II
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-12
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-3
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	IV
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V Penutup	V

Pendahuluan



Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pada periode RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 sedangkan Renstra PD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Tahun 2024. Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja PD juga harus berpedoman pada RKPD untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Renstra PD 2023-2026.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada RKPD Provinsi DKI Jakarta, selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2024 dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta guna menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diperlukan panduan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
23. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 30. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
 33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
 34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005;
 35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 37. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 38. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 39. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 40. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 41. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 42. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

43. Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 53/SE/2019 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III dan Swakelola Tipe IV;
45. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 53/SE/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/ pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan RKPD Tahun 2024, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah "Peningkatan Ketahanan Kota melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar".

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Bab ini menyajikan data pengukuran kinerja dan analisa hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, permasalahan dan tantangan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta form isian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah.

BAB III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta,

perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Program dan Kegiatan.

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang garis besar rencana program dan prioritas Perangkat Daerah dalam Renja Tahun 2024.

BAB V : Penutup

Bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 yang berisi uraian catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra,
Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Pada sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (sampai dengan tahun 2023)

Nama Perangkat Daerah	Kode (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan		
	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10				11 = (10/5) x 100%	12							
Badan Pendapatan Daerah	A																
Badan Pendapatan Daerah	A	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02			Keuangan											
Badan Pendapatan, Daerah	A	5	.03	.04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	88,13%	88,11%	100%	0%	88,11%			
							- Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	100%	100%	46,72%	46,72%	100%	0%	46,72%			
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02	.04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	4	4	100,00%	4	0%	-			
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02	.04	1.01	.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	-	1	1	100,00%	1	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02	.04	1.01	.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	1	1	100,00%	1	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02	.04	1.01	.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	1	1	100,00%	1	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02	.04	1.01	.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	2	2	100,00%	2	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02	.04	1.01	.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1	1	100,00%	1	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02	.04	1.01	.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	1	1	100,00%	1	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02	.04	1.01	.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	2	2	100,00%	2	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02	.04	1.01	.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1	1	100,00%	1	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02	.04	1.01	.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	1	1	100%	1	0%	-		
										1	1	100%	1	0%			

Nama Perangkat Daerah	Kode (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-S889 Tahun 2021)					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022				Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan	
									Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Capaian (%)	8 = (7/6) x 100%		Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)		11 = (10/5) x 100%
1	2					3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10	11 = (10/5) x 100%	12		
Badan Pendapatan Daerah	A																
Badan Pendapatan Daerah	A	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02			Keuangan											
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	100%	4	0%	100%			
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	-	4	4	100,00%	4	0%	-			
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.02	.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	12	12	100,00%	789	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	-	4	4	100,00%	4	0%	-			
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.05	.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	0	0	0,00%	54	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.05	.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	0	0	0,00%	431	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.05	.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	100	100	100,00%	325	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	-	4	4	100,00%	4	0%	-			
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0	0	0,00%	1	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	7	7	100,00%	7	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0	0	0,00%	49	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	49	49	100,00%	49	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	49	49	100,00%	49	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0	0	0,00%	49	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	0	0	0,00%	1	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.06	.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	0	0	0,00%	1	0%	-		

Nama Perangkat Daerah	Kode (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan	
									Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)		
																8 = (7/6) x 100%
1	2					3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10	11 = (10/5) x 100%	12	
Badan Pendapatan Daerah	A															
Badan Pendapatan Daerah	A	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
Badan Pendapatan Daerah	A	5	.02			Keuangan										
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	100%	4	0%	100%		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	-	4	4	100,00%	4	0%	-		
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.07	.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	0	0,00%	1	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.07	.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	0	0,00%	256	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.07	.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	0	100,00%	2	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4	4	100,00%	4	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.08	.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0	0	0,00%	4	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.08	.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	100%	100%	100,00%	4	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.08	.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.08	.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	4	4	100,00%	4	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4	4	100,00%	4	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.09	.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	249	249	100,00%	249	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.09	.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	280	280	100,00%	263	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.09	.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	42	42	100,00%	42	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.09	.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	16	16	100,00%	16	0%	-	
Badan Pendapatan Daerah	A	X	XX	.01	1.09	.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	307	307	100,00%	307	0%	-	

Nama Perangkat Daerah	Kode (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-S889 Tahun 2021)					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan	
									Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)		
																8 = (7/6) x 100%
1	2					3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10	11 = (10/5) x 100%	12	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	B															
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	B	5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	B	5	.02			Keuangan										
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	B	5	.02	.04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah - Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	100% 100%	100% 100%	88,11% 46,72%	88,11% 46,72%	100% 100%	0% 0%	88,11% 46,72%		
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	B	5	.02	.04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	4	4	100,00%	4	0%	-		
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	5	.02	.04	1.01	.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	1	1	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	B	5	.02	.04	1.01	.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	1	1	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	B	5	.02	.04	1.01	.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	1	1	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	B	5	.02	.04	1.01	.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	1	1	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	B	5	.02	.04	1.01	.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	1	1	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	5	.02	.04	1.01	.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	2	2	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	B	5	.02	.04	1.01	.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	2	2	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	B	5	.02	.04	1.01	.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	2	2	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	B	5	.02	.04	1.01	.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	2	2	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	B	5	.02	.04	1.01	.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	2	2	100,00%	1	0%	-	

Nama Perangkat Daerah	Kode (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)				Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan	
								Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)		
															8 = (7/6) x 100%
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10	11 = (10/5) x 100%	12	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	B														
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	B	X	XX	.01		Program Peningkatan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	4	4	4	100,00%	4	0%	100%	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	B	X	XX	.01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	-	4	4	100,00%	4	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	.01	1.06	.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	B	X	XX	.01	1.06	.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	B	X	XX	.01	1.06	.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	B	X	XX	.01	1.06	.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	B	X	XX	.01	1.06	.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	0	0	0,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	.01	1.06	.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0	0	0,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	B	X	XX	.01	1.06	.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0	0	0,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	B	X	XX	.01	1.06	.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0	0	0,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	B	X	XX	.01	1.06	.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0	0	0,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	B	X	XX	.01	1.06	.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0	0	0,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	.01	1.06	.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	B	X	XX	.01	1.06	.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	B	X	XX	.01	1.06	.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	B	X	XX	.01	1.06	.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	B	X	XX	.01	1.06	.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	.01	1.06	.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	B	X	XX	.01	1.06	.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	B	X	XX	.01	1.06	.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	B	X	XX	.01	1.06	.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1	1	100,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	B	X	XX	.01	1.06	.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1	1	100,00%	0	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	.01	1.06	.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0	0	0,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	B	X	XX	.01	1.06	.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0	0	0,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	B	X	XX	.01	1.06	.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0	0	0,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	B	X	XX	.01	1.06	.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0	0	0,00%	1	0%	-
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	B	X	XX	.01	1.06	.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0	0	0,00%	1	0%	-

Nama Perangkat Daerah	Kode (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Bencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan
	Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Capaian (%)	Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)											
1	2						3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10	11 = (10/5) x 100%	12
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	B															
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	B	X	XX	.01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4	4	100,00%	4	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	.01	1.08	.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	B	X	XX	.01	1.08	.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	B	X	XX	.01	1.08	.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	B	X	XX	.01	1.08	.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	B	X	XX	.01	1.08	.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	1	100,00%	1	0%	-	

Untuk tahun anggaran 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta secara umum terdapat 3 (tiga) Program, 8 (delapan) Kegiatan, 25 Sub Kegiatan dan 243 Aktivitas Sub Kegiatan (ASK). Sedangkan pada tingkat Kota Administrasi atau unit kerja Suku Badan Pendapatan Daerah Kota terdapat 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan, 6 (enam) Sub Kegiatan dan secara total terdapat 29 (dua puluh Sembilan) Aktivitas Sub Kegiatan (ASK). 3 (tiga) Program yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah yakni Program pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan berikut ini :

- 1) Mengacu pada Indikator program yang tercantum pada RPD Tahun 2023-2026, Indikator kinerja untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah dan persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah.
- 2) Dengan menyesuaikan terhadap indikator program tersebut maka dapat disampaikan bahwa untuk persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah untuk tahun anggaran 2022 tercapai 88,11% sedangkan untuk persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah untuk tahun anggaran 2022 tercapai 46,72%.
- 3) Lebih lanjut nilai capaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah penerimaan pajak daerah hingga triwulan 4 (empat) tahun 2022 mencapai Rp.40.267.758.921.920,- dari target awal penetapan APBD 2022 sebesar Rp.45.700.000.000.000,-. Sedangkan bila

menggunakan target yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 tanggal 23 September 2022, target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp.41.435.000.000.000,- maka tercapai 97,18%. Kemudian untuk jumlah penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan triwulan 4 (empat) tahun 2022 mencapai Rp.376.979.077.910,- dari target penerimaan Retribusi Daerah triwulan 4 (empat) sebesar Rp.806.878.300.000,-.

- 4) Pada Program ini hanya ada 1 (satu) Kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator kegiatan berupa Indeks Kepuasan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan capaian nilai indeks 4 atau tercapai 100% dari target.
- 5) Pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini terdapat 7 Sub Kegiatan dengan kondisi sebagai berikut (Mengacu pada Indikator program yang tercantum pada RPD Tahun 2023-2026) :
 - a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Dengan indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah dan Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah, realisasi untuk kedua indikator tersebut tercapai 100%;
 - b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah. Dengan indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah terealisasi 100%;
 - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah. Dengan indikator kinerja berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terealisasi 100%;
 - d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Dengan indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah terealisasi 100%;
 - e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah. Dengan indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah terealisasi 100%;
 - f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah. Dengan indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti terealisasi 100%;
 - g. Penagihan Pajak Daerah. Dengan indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak terealisasi 100%;
 - h. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan indikator capaian berupa Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan terealisasi 100%;

Pada tahun 2022 di Badan Pendapatan Daerah masih terdapat Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Indikator kinerja berupa Persentase pegawai yang dikirim untuk mengikuti kegiatan Diklat, dengan realisasi capaian output kegiatan tercapai 100% namun mengacu pada Indikator program yang tercantum pada RPD Tahun 2023-2026, untuk program ini dimasukkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut ini (Mengacu pada Indikator program yang tercantum pada RPD Tahun 2023-2026) :

- 1) Indikator kinerja dari program ini adalah Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi capaian kinerja program pada triwulan 4 (empat) yakni mencapai indeks 4 (empat) atau 100%;
- 2) Pada Program ini terdapat 6 (enam) Kegiatan yakni :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki indikator kinerja yakni Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan, pada triwulan 4 (empat) TA 2022, capaian kinerja kegiatan mencapai nilai indeks 4 (empat) atau 100%. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yakni Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator capaian yakni Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2022 terealisasi 100%;
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki indikator kinerja yakni Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian, pada triwulan 4 (empat) TA 2022, capaian kinerja kegiatan mencapai nilai indeks 4 (empat) atau 100%. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yakni Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator capaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2022 terealisasi 100%;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini memiliki indikator kinerja yakni Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum, pada triwulan 4 (empat) TA 2022, capaian kinerja kegiatan mencapai nilai indeks 4 (empat) atau 100%. Pada kegiatan ini memiliki 5 (lima) sub kegiatan yakni :
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator capaian berupa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun 2022 terealisasi 100%;
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator capaian berupa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun 2022 terealisasi 100%;

- iii. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator capaian berupa Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun 2022 terealisasi 100%;
 - iv. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material dengan indikator capaian berupa Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan pada tahun 2022 terealisasi 100%;
 - v. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator capaian berupa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada tahun 2022 terealisasi 100%;
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini memiliki indikator kinerja yakni Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien pada tahun 2022 terealisasi 100%. Pada kegiatan ini awalnya terdapat 1 (satu) sub kegiatan yakni Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator capaian Persentase efektivitas layanan kantor, pada Sub Kegiatan ini sebelumnya terdapat 1 (satu) PASK tetapi pada fase perubahan APBD 2022 di-drop walaupun secara anggaran PASK dihapus namun kegiatan operasional pelayanan di UP3D tetap berjalan.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini memiliki indikator capaian yakni Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 terealisasi 100%. Pada kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan yakni :
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator capaian Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun 2022 terealisasi 100%;
 - ii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator capaian Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun 2022 terealisasi 100%;
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator capaian Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun 2022 terealisasi 100%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini memiliki indikator capaian yakni Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

pada tahun 2022 terealisasi 100%. Pada kegiatan ini memiliki 5 (lima) sub kegiatan yakni :

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator capaian Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun 2022 terealisasi 100%;
- ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator capaian Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun 2022 terealisasi 100%;
- iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator capaian Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun 2022 terealisasi 100%;
- iv. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan indikator capaian Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun 2022 terealisasi 100%;
- v. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan indikator capaian Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun 2022 terealisasi 100%

Selanjutnya di masing-masing Suku Badan Pendapatan Daerah Kota, terdapat 2 (dua) Program yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, target dan capaiannya tergabung dalam target di tingkat Badan karena target indikator kinerja program tersebut diampu dengan tipe Pj "Penanggung Jawab Bersama", dalam program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 terealisasi 100%. Pada program ini terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yakni Penagihan Pajak Daerah dengan indikator capaian Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak., dimana untuk 5 (lima) Suku Badan Pendapatan Daerah Kota pada tahun 2022 terealisasi 100%.

Kemudian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator capaian Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di 5 (lima) Suku Badan Pendapatan Daerah Kota pada tahun 2022 terealisasi 100%. Pada program ini memiliki 2 (dua) Kegiatan yakni :

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum pada tahun 2022 terealisasi 100%. Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yakni :
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator capaian Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, pada 4 (empat) Suku Badan Pendapatan Daerah Kota untuk tahun 2022 terealisasi 100%;
 - ii. Sub Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator capaian Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, pada 5 (lima) Suku Badan Pendapatan Daerah Kota untuk tahun 2022 terealisasi 100%;
 - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator capaian Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, pada 5 (lima) Suku Badan Pendapatan Daerah Kota untuk tahun 2022 terealisasi 100%
 - iv. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan indikator capaian Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu pada 5 (lima) Suku Badan Pendapatan Daerah Kota untuk tahun 2022 terealisasi 100%.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator capaian Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 terealisasi 100%. Pada Kegiatan ini hanya terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator capaian Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada 5 (lima) Suku Badan Pendapatan Daerah Kota untuk tahun 2022 terealisasi 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Sub bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dibawah ini ditampilkan tabel pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah s.d. Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL	100%	100%	100%	100%	88,11%	-	100%	100%	
2	Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	NIHIL	NIHIL	100%	100%	100%	100%	46,72%	-	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengidentifikasi isu-isu strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 yang menjadi fokus pembangunan kota Jakarta selama 4 (empat) tahun ke depan. Berdasarkan isu-isu strategis tersebut terdapat isu yang terkait dengan penugasan Badan Pendapatan Daerah sebagai institusi pengelolaan pendapatan daerah, salah satunya adalah **Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik**. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih baik dan lebih transparan perlu menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik merupakan jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal.

Pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilaksanakan dimana hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah memiliki komitmen dan konsistensi terhadap pelaksanaannya dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi. Pembenaan birokrasi terkait dengan perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparatur pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian organisasi serta jumlah pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat ukuran

dan fungsi sehingga lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah.

Aspek penting lainnya yang perlu menjadi fokus Badan Pendapatan Daerah adalah kebijakan dan pelayanan yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan serta menghindari *high cost economy* dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat kepatuhan wajib pajak	Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah berada dibawah 75%	Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak
2	Data Objek Pajak	Dinamisnya objek pajak di lapangan	Belum optimalnya pendataan objek pajak daerah secara berkesinambungan
3	Pencairan Piutang Pajak Daerah	Penagihan atas piutang pajak daerah telah dicairkan sebesar $\pm 25\%$ dari total tunggakan yang ada pertahunnya (audited)	Belum optimalnya penagihan pencairan piutang pajak daerah
4	Kualitas dan kuantitas SDM	SDM saat ini berjumlah 789 pegawai	Jumlah dan kemampuan SDM dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah kurang memadai.
5	Sarana dan Prasarana pelayanan pajak daerah	Masih banyaknya unit kerja yang menumpang pada gedung instansi lainnya	Jumlah gedung sarana dan prasarana operasional Badan Pendapatan Daerah belum memadai
6	Integrasi data Wajib Pajak secara online dengan instansi terkait	Belum terintegrasinya sistem Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait	Belum optimalnya: a. penyusunan potensi penerimaan pajak daerah b. penataan titik-titik reklame c. penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) d. penetapan kawasan strategi ekonomi dan kawasan strategi budaya

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan tema RKP Tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut kemudian didukung dan diturunkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional, 8 (delapan) Arah Kebijakan, dan 3 (tiga) strategi kebijakan tahun 2024 sebagaimana berikut:

- a) PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- b) PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
- c) PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d) PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e) PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f) PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- g) PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Merujuk kepada 7 (tujuh) Prioritas Nasional diatas tidak ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.



Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan di wilayahnya. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan keselarasan antara cakupan dan substansi TPB/SDGs dan Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Badan Pendapatan Daerah bersama seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memegang peran yang strategis untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Pada aspek implementasi, Badan Pendapatan Daerah memiliki keterkaitan erat terhadap salah satu tujuan dari 17 Tujuan yang terdapat pada TPB/SDGs. Tujuan-tujuan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tersebut yakni : ***Tujuan ke-17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan – Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.***

Salah satu target yang dirumuskan di dalam Tujuan ke-17 TPB/SDGs adalah *Memperkuat Mobilitas Sumber Daya Domestik, Termasuk Melalui Dukungan Internasional Kepada Negara Berkembang untuk Meningkatkan Kapasitas Lokal bagi Pengumpulan Pajak dan Pendapatan Lainnya*. Dimana indikator tujuannya adalah :

1. Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap GDP menurut Sumbernya;
2. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB; dan
3. Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak Domestik.

Indikator tersebut mengukur persentase total pendapatan pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah "Transformasi Jakarta Sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia".

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 merujuk kepada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Dimana tujuannya adalah Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehingga tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	89,39%	89,27%	89,14%	88,86%
2		Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026

3.3 Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah pada Tabel 3.2 diatas dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024, telah dirumuskan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun ke depan yakni Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan indikator tujuan berupa Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sedangkan Sasaran strategis berdasarkan rumusan tujuan Badan Pendapatan Daerah yakni Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan indikator sasaran berupa persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, Pada level Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 Program, 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Sedangkan pada level Suku Badan Pendapatan Daerah Kota secara umum terdiri dari 2 Program, 4 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan.

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah



4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Subbab ini memuat rincian program, kegiatan dan anggaran indikator Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024. Berikut disampaikan Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025

Tabel 4.1. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01	Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	795 Orang	998.104.147.000	PAD		795 Orang	1.147.819.769.050
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	DKI Jakarta	4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DKI Jakarta	580 Orang	3.286.902.150	PAD		580 Orang	3.779.937.473
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi	DKI Jakarta	4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	1.199.998.945	PAD		1 Paket	1.379.998.787
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	7 Paket	17.604.441.849	PAD		7 Paket	20.245.108.127

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	5.02	Keuangan								
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	49 Paket	825.847.220	PAD		49 Paket	949.724.303
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	49 Paket	10.533.571.287	PAD		49 Paket	12.113.606.981
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	1.199.993.000	PAD		1 Paket	1.379.991.950
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	49 Laporan	167.036.220	PAD		49 Laporan	192.091.653
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	49 Laporan	630.864.983	PAD		49 Laporan	725.494.731
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DKI Jakarta	1 Dokumen	1.344.210.000	PAD		1 Dokumen	1.545.841.500
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	1 Dokumen	3.731.542.500	PAD		1 Dokumen	4.291.273.875

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	.02	Keuangan								
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	DKI Jakarta	4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .01 1.07 .09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	2 Unit	108.999.810.200	PAD		2 Unit	125.349.781.730
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .01 1.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	4 Laporan	9.953.443.240	PAD		4 Laporan	11.446.459.726
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .01 1.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	21.000.000.000	PAD		4 Laporan	24.150.000.000
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .01 1.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Laporan	2.171.306.520	PAD		1 Laporan	2.497.002.498
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .01 1.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	37.035.967.482	PAD		4 Laporan	42.591.362.605

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	5.02	Kuangan							
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks		PAD		4 Indeks
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks		PAD		4 Indeks
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	249 Unit	1.784.291.944	PAD		249 Unit
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	289 Unit	2.499.951.951	PAD		289 Unit
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	42 Unit	29.999.946.510	PAD		42 Unit
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	16 Unit	1.499.967.714	PAD		16 Unit
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	307 Unit	286.496.006	PAD		307 Unit
									2.051.935.736
									2.874.944.744
									34.499.938.487
									1.724.962.872
									329.470.407

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	5 .02	Keuangan								
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah - Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	DKI Jakarta	- 100% - 100%	PAD	- 100% - 100%			
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04 .1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	PAD	4 Indeks			
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04 .1.01 .02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah - Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	DKI Jakarta	- 1 Dokumen - 1 Laporan	PAD	- 1 Dokumen - 1 Laporan			13.535.952.422
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04 .1.01 .03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	DKI Jakarta	1 Laporan	PAD	1 Laporan			42.148.740.507
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04 .1.01 .04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	DKI Jakarta	2 Sarana dan Prasarana	PAD	2 Sarana dan Prasarana			65.892.112.258
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04 .1.01 .05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	DKI Jakarta	1 Laporan	PAD	1 Laporan			36.787.607.613
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04 .1.01 .06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	DKI Jakarta	1 Laporan	PAD	1 Laporan			10.926.336.136

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	5 .02	Keuangan								
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah - Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	DKI Jakarta	- 100% - 100%	PAD	PAD		- 100% - 100%	
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04 .1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	PAD	PAD		4 Indeks	
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04 1.01 .08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	DKI Jakarta	2 Laporan	4.425.880.411	PAD		2 Laporan	5.089.762.473
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04 1.01 .10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	DKI Jakarta	1 Dokumen SSFD	2.885.221.526	PAD		1 Dokumen SSFD	3.318.004.755
Badan Pendapatan Daerah	5 .02 .04 1.01 .12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	DKI Jakarta	- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	662.864.818	PAD		- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	762.294.541

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Praktiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .01	Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Paket	6.140.300	PAD		1 Paket	7.061.345
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Paket	97.187.600	PAD		1 Paket	111.765.740
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Paket	38.204.586	PAD		1 Paket	43.935.274
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Laporan	14.070.000	PAD		1 Laporan	16.180.500
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Laporan	32.927.040	PAD		1 Laporan	37.866.096
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah - Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	Kota Administrasi Jakarta Pusat	- 100% - 100%		PAD		- 100% - 100%	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .04	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Indeks		PAD		4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .04	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Laporan	33.945.466	PAD		1 Laporan	39.037.286
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .04	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangginya WP yang Memiliki Flutang Pajak	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Dokumen SSPD	16.742.180	PAD		1 Dokumen SSPD	19.253.507
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 .02 .04	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak	Kota Administrasi Jakarta Pusat	- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	259.981.000	PAD		- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	298.978.150

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .01	Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Utara	4 Indeks	PAD	4 Indeks			
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Administrasi Jakarta Utara	4 Indeks	PAD	4 Indeks			
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .01 1.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Paket	PAD	1 Paket	1 Paket	7.984.232	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .01 1.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Paket	PAD	1 Paket	1 Paket	24.640.222	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .01 1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Paket	PAD	1 Paket	1 Paket	24.425.769	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .01 1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Laporan	PAD	1 Laporan	1 Laporan	41.402.300	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Utara	4 Indeks	PAD	4 Indeks			
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .01 1.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Laporan	PAD	1 Laporan	1 Laporan	49.016.664	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah - Persentase realisasi penerimaan Retribusi	Kota Administrasi Jakarta Utara	- 100% - 100%	PAD	- 100% - 100%			
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Utara	4 Indeks	PAD	4 Indeks			
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .04 1.01 .03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Laporan	PAD	1 Laporan	1 Laporan	22.502.579	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .04 1.01 .10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Rutang Pajak	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Dokumen SSPD	PAD	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	22.505.845	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	5 .02 .04 1.01 .12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak	Kota Administrasi Jakarta Utara	- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	PAD	- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	206.967.800	

(1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	(2) Kode	(3) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	(4) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	(5) Lokasi	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					(6) Target Capaian Kinerja	(7) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	(8) Sumber Dana	(9) Catatan Penting	(10) Target Capaian Kinerja
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .01	Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Indeks		PAD	4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Indeks		PAD	4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .01 1.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Paket	7.816.510	PAD	1 Paket	8.988.987
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .01 1.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Paket	22.610.040	PAD	1 Paket	26.001.546
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .01 1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Paket	38.003.860	PAD	1 Paket	43.704.439
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .01 1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Laporan	38.100.000	PAD	1 Laporan	43.815.000
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Indeks		PAD	4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .01 1.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Laporan	32.927.040	PAD	1 Laporan	37.866.096
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah - Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	Kota Administrasi Jakarta Barat	- 100% - 100%		PAD	- 100% - 100%	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Indeks		PAD	4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .04 1.01 .03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Laporan	34.164.186	PAD	1 Laporan	39.288.614
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .04 1.01 .10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggunya WVP yang Memiliki Flutang Pajak	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Dokumen SSPD	22.742.180	PAD	1 Dokumen SSPD	26.153.507
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	5 .02 .04 1.01 .12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak	Kota Administrasi Jakarta Barat	- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	169.961.000	PAD	- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	195.455.150

Perangkat Daerah/Lnit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.01	Kuangan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	PAD			4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.01.1.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	PAD			4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Paket	PAD	4.847.100		1 Paket	5.574.165
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Paket	PAD	46.522.400		1 Paket	53.500.760
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Paket	PAD	35.737.435		1 Paket	41.098.051
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Laporan	PAD	22.550.000		1 Laporan	25.932.500
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	PAD			4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Laporan	PAD	32.927.040		1 Laporan	37.866.096
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah - Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	Kota Administrasi Jakarta Selatan	- 100% - 100%	PAD			- 100% - 100%	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	PAD			4 Indeks	
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Laporan	PAD	33.352.496		1 Laporan	38.355.371
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.04.1.01.10	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WVP yang Memiliki Plutang Pajak	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Dokumen SSPD	PAD	25.942.180		1 Dokumen SSPD	29.833.507
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak	Kota Administrasi Jakarta Selatan	- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	PAD	299.972.000		- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	344.967.800

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.01	Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Timur	4 Indeks	PAD	4 Indeks			
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Administrasi Jakarta Timur	4 Indeks	PAD	4 Indeks			
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Paket	PAD	1 Paket	8.261.917		
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Paket	PAD	1 Paket	42.851.530		
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Paket	PAD	1 Paket	28.185.994		
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Laporan	PAD	1 Laporan	36.328.500		
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Timur	4 Indeks	PAD	4 Indeks			
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Laporan	PAD	1 Laporan	37.866.096		
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah - Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	Kota Administrasi Jakarta Timur	- 100% - 100%	PAD	- 100% - 100%			
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.04	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Timur	4 Indeks	PAD	4 Indeks			
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.04	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Laporan	PAD	1 Laporan	40.439.808		
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.04	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Rutang Pajak	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Dokumen SSPD	PAD	1 Dokumen SSPD	15.392.923		
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	5.02.04	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak	Kota Administrasi Jakarta Timur	- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	PAD	- 1 Dokumen LHP - 1 Laporan	103.482.750		

*hanya diisi sampai Sub Kegiatan (mulai 2023 sudah tidak menggunakan RSK/PASK lagi)

PENUTUP



Penutup Dokumen Renja

Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2023-2026. Fungsi Dokumen Renja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2024.

Diharapkan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk percepatan pencapaian Sasaran menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD 2023-2026 dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Jakarta, Juli 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Lusiana Herawati

NIP. 196706131988032002